

**TINGKAT KEBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA  
(KASUS PADA PROGRAM PEKKA DI DESA DAYAH TANOH  
KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH)**

**Oleh: Elly Susanti**

**ABSTRACT**

*Women empowerment is an effort to enhance the capacity of women gaining access and control to economic, politic, social and cultural resources. It is also to strengthen self-development and self-confidence regarding ability to contribute and active participation in the process of decision-making, that reinforce development capability and self-concept. Women headed household empowerment program (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga – PEKKA) aims to cope and deal with any potential women headed household problems comprehensively through community organizing, in particular, related to class and gender inequalities in the community. In order to achieve that objective, the strategy of project management of PEKKA focuses on five pillars, which are participatory, flexibility, mentoring and facilitating, sustainability, and decentralized.*

*This study aims to assess the level of empowerment of women headed household after joining the PEKKA program. The study employs qualitative approach, which is women headed household as a unit analysis. Data gathering was through primary and secondary sources. Primary data collected through participatory observation, in-depth interview, and focus group discussion, meanwhile secondary obtained through project related supportive documents. The process of analysis data was using data reduction, data arrangement and presentation, interpretation, tentative argument and conclusion, and verification. The study shows that the significance of the program encouragingly contributes to empowering women headed household through improvement of wellbeing, opens access to resources, increase critical awareness, as well as participation and control. It is to the greater extent connects to the objective of the program.*

*Keywords: empowerment, PEKKA, women headed household*

**PENDAHULUAN**

Kondisi kualitas hidup dan peran perempuan di Indonesia masih rendah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik yang menyebabkan kesenjangan gender dalam pembangunan. Berdasarkan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia (2010), angka buta aksara perempuan

sebesar 12,28 persen, sedangkan laki-laki 5,84 persen. Dalam bidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama, di mana angka kematian ibu (AKI) juga masih sangat tinggi, yaitu sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5 persen) daripada perempuan (50,2 persen).

---

\* Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Kesenjangan gender dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari fenomena kemiskinan. Dalam membedah kemiskinan, permasalahan yang berat sesungguhnya dialami kaum perempuan. Bahkan, kemiskinan kerap identik dengan kehidupan perempuan. Data MDG's 2010 menunjukkan, dari sepertiga penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 70 persennya adalah perempuan. Di Indonesia dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 32,53 juta jiwa (14,15 persen), 70 persen dari mereka adalah perempuan (BPS, 2009). Berdasarkan data di atas, perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang paling banyak memikul beban kemiskinan, terutama apabila perempuan berperan sebagai satu-satunya kepala rumah tangga yang harus menghidupi anak-anaknya.

Pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 14 persen atau sekitar 9 juta rumah tangga di Indonesia di kepalai oleh perempuan. Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan kualitas sumberdaya perempuan kepala keluarga yang rendah, yang dicirikan dengan beberapa faktor, antara lain meliputi: usia mereka antara 20 sampai 60 tahun, lebih dari 38.8 persen buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun, menghidupi antarasatu sampai enam orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10.000 per hari, sebagian mereka mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun negara (Laporan Tahunan PEKKA, 2010).

Sehubungan dengan masalah kemiskinan ini, pemerintah Indonesia

telah banyak melaksanakan program untuk mengurangi jumlah penduduk miskin terutama perempuan dengan berbagai strategi dan pendekatan. Namun demikian, pada umumnya program tersebut berupa pemberian permodalan dan pembangunan infrastruktur yang padat karya dan cenderung pada pelaku ekonomi secara umum saja. Sebagai hasil dari strategi program yang cenderung sektoral, ternyata masih belum menyentuh akar permasalahan penyebab kemiskinan yang salah satunya bermuara ke masalah kesenjangan gender. Masalah rendahnya produktivitas perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga sama sekali belum disentuh secara mendetail dan berkesinambungan.

Di sisi lain juga merupakan dorongan dari perubahan dalam paradigma pembangunan internasional yang telah menuntut adanya pelibatan perempuan dalam pembangunan, dan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan perempuan di dalam strategi pembangunan. Ada beberapa pendekatan yang sebetulnya telah dilaksanakan di mana pada awalnya tekanannya adalah pada wanita WID, *Woman in Development*. Di mana pendekatan-pendekatan yang lalu, pendekatan pertama kali adalah pendekatan kesejahteraan: bagaimana kesejahteraan itu ditingkatkan, wanita dianggap sebagai objek pembangunan. Kemudian pendekatan kesamaan. Kemudian ada pendekatan anti-kemiskinan, efisiensi, dan sebagainya, yang semuanya ini dianggap tidak mampu untuk mengatasi permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan itu sendiri. Sampai pada akhirnya muncul pendekatan mutakhir yang disebut dengan pendekatan pemberdayaan (Saptandari, 1999).

Pada pendekatan pemberdayaan

ini sebenarnya diasumsikan bahwa kalau ingin memperbaiki posisi perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar-menawar dan untuk merubah sendiri nasibnya. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai objek tetapi juga sebagai pelaku aktif, sebagai orang yang ikut merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Salah satu program pembangunan atau pemberdayaan yang melibatkan perempuan khususnya perempuan kepala rumahtangga adalah Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). PEKKA bertujuan untuk memahami persoalan perempuan kepala keluarga yang komprehensif, sehingga program ini menerapkan strategi pengorganisasian masyarakat atau *community organizing* (CO) dengan menyoal ketidakadilan gender dan kelas yang ada dalam masyarakat. Untuk mendukung strategi tersebut maka ada lima prinsip dasar program yang diterapkan dalam pelaksanaan PEKKA yaitu partisipatif, fleksibel, pendampingan dan fasilitasi, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Melihat dari strategi yang diterapkan, maka PEKKA ini merupakan salah satu contoh konsep pembangunan yang bersifat *bottom-up planning*. Konsep *bottom-up planning* merupakan sebuah konsep pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan pada setiap tahap, tercakup di dalamnya proses perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi pembangunan (Laporan PEKKA, 2010).

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal Komnas Perempuan yang ingin mendokumentasikan

kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam merespons permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tingkat keberdayaan perempuan kepala keluarga di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Mutiara setelah mengikuti Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya. Peneliti sedapat mungkin berinteraksi langsung dan mengenal secara dekat dunia kehidupan informan, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. Istilah kualitatif menunjuk pada proses dan makna yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensi, penekanan diberikan pada sifat konstruksi sosial dari realitas dan mencari jawaban bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna (Denzin dan Lincoln dalam Salim, 2001).

Lokasi penelitian di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan sengaja (*purposive*), dengan alasan bahwa desa ini merupakan salah satu desa yang mendapatkan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Informan yang ditemui di daerah penelitian adalah ketua kelompok (AA) dan beberapa anggota yaitu: Ibu Hmm (54 tahun), NC (51 tahun), Am (36 tahun), NT (45 tahun),

BR 950 tahun), Rh (55 taun) dan Sb (62 tahun). Disamping itu juga melakukan wawancara dengan kepala desa (Bapak MYH), anggota tuha peut (Bapak Ib), tokoh agama (Ibu Um) dan istri kepala desa (Ibu Rm) untuk triangulasi dan informasi tambahan .

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari *informan*. Data primer diperoleh dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen antara lain: dokumen-dokumen yang terdapat di balai Desa Dayah Tanoh, Kantor Kecamatan Mutiara Timur, dan Center PEKKA Kabupaten Pidie.

Analisis data meliputi: (1) reduksi data, yaitu memilah dari data yang didapat dari lokasi penelitian yang dicatat dalam catatan lapang dan direkam untuk menggolongkannya ke dalam data bentuk komunikasi partisipatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi partisipatif tersebut; (2) penyajian data berupa data mengenai bentuk komunikasi partisipatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi partisipatif dalam bentuk tulisan dan tabel; dan (3) membuat kesimpulan dan interpretasi berdasarkan data yang ditemukan di lapangan (Miles dan Huberman, 1992).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keberdayaan Perempuan Kepala Keluarga**

Dalam penelitian ini keberdayaan perempuan kepala keluarga dilihat dari tingkat kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol mereka setelah mengikuti program sesuai dengan tujuan dari program pemberdayaan ini.

Adapun tingkat kesejahteraan dinilai dari: peningkatan pendapatan, peningkatan simpanan di kelompok, peningkatan pinjaman di kelompok, tingkat pengembalian pinjaman dan peningkatan aset perempuan kepala keluarga.

Peningkatan akses terhadap sumberdaya dinilai dari terbukanya akses sumberdaya bagi anggota dalam hal: dana Pemerintah (Dana Desa, APBD, dan lain-lain) untuk kegiatan hukum, politik, sosial dan ekonomi, dana untuk layanan kesehatan gratis bagi perempuan miskin, pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diadakan oleh pihak lain.

Tingkat partisipasi dinilai dari tingkat kehadiran anggota dalam kegiatan kelompok, tingkat keaktifan para anggota dalam kegiatan untuk menyuarkan kebutuhannya dalam kelompok, tingkat kehadiran dalam kegiatan yang diadakan pihak lain seperti rapat desa, musrenbang dan lainnya.

Kesadaran kritis dilihat dari: tumbuh kebutuhan belajar dan mendapat pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas diri, peningkatan jumlah masalah yang berhasil diidentifikasi dan yang berhasil diselesaikan, kemampuan mengadvokasi persoalan atau perlakuan tidak adil yang mereka hadapi ke pihak berwenang untuk menyelesaikannya.

Peningkatan kontrol dilihat dari: kemampuan membuat keputusan diri sendiri di lingkup rumah tangga, partisipasi aktif dalam mengawasi, mempertanyakan dan menentukan kegiatan kelompok yang akan dilakukan, mampu mengusulkan dan mengawasi pembuatan kebijakan lokal yang berhubungan dengan persoalan ketidakadilan yang mereka hadapi.

Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Dayah Tanoh telah memberi dampak positif terhadap kegiatan perekonomian anggotanya, salah satunya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota PEKKA terutama di bidang ekonomi.

Keikutsertaan dalam program ini dapat meningkatkan kebahagiaan bathin bagi Ibu Sb karena beliau merasa terhibur ketika berkumpul dengan anggota lain, bisa saling bercanda, tertawa, memperoleh informasi dan pengetahuan, seperti yang dijelaskannya berikut ini:

*“Saya kan ikut program ini hanya untuk bisa ngumpul ama yang lain, kan saya gak da kerja jadi bisa untuk hiburan, isi waktu, selain bisa tau informasi dan nambah ilmu juga. Jadi buat senang-senang aja, kan udah tua apa yang saya pikirkan lagi, buat makan dah dikasih anak saya karena tinggal ama dia sekarang”*

Keberdayaan juga dapat dilihat dari segi terbukanya akses terhadap sumberdaya. Akses terhadap sumberdaya Ibu Sb adalah dapat mengikuti kelas KF (Keaksaraan Fungsional) yang difasilitasi oleh PL dan anggota lain seperti Ibu NT dan Ibu Am jika PL tidak hadir. Mereka diajarkan baca tulis hingga mendapatkan sertifikat, seperti yang disampaikannya berikut ini:

*“Saya ikut kelas buta huruf itu, kan saya dan beberapa anggota lain gak bisa baca tulis jadi kami diajarkan oleh PL atau kadang-kadang oleh anggota lain seperti NT atau Am. Kami belajar sampai kami bisa lah tapi agak susah ya karena udah tua ya, tapi pelan-pelan lah,*

*sekarang saya sudah mengenal huruf” (Sb).*

Selain mengikuti kelas Keaksaraan Fungsional, Ibu Sb juga mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan bantuan beras untuk orang miskin (raskin). Ibu Sb mengaku jika sakit dapat berobat ke puskesmas atau rumah sakit secara gratis hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan bantuan beras miskin diperolehnya dalam jangka waktu tiga bulan sekali atau kadang-kadang dalam waktu yang tidak menentu. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Sb:

*“Kalau berobat ke puskesmas gratis ya, kalau mau kerumah sakit juga gratis hanya bawa KTP katanya, soalnya saya belum pernah ke rumah sakit. Paling kalau saya demam, rematik kambuh ke puskesmas aja dikasih obat udah sembuh jadi gak perlu ke rumah sakit....Iya beras miskin itu saya dapat, kadang-kadang tiga bulan sekali, gak tentu lah. Biasanya ada pengumuman di Meunasah disuruh ambil beras miskin, biasa saya cuma dapat sepuluh kilo apa, gak ingat saya, biasa diambil anak saya” (Sb).*

Tingkat partisipasi Ibu Sb dalam kegiatan program maupun kegiatan yang dilakukan di desa cenderung rendah. Dalam setiap pertemuan dalam program maupun pertemuan desa beliau hanya hadir mendengarkan saja tidak menyampaikan pendapat, saran ataupun bertanya. Ibu Sb mengaku selalu menghadiri pertemuan rutin anggota dan pernah mengikuti rapat desa yang membahas mengenai program PNPM. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sb:



*“Saya pernah ikut rapat desa, kalau gak salah rapat mengenai program PNPM tapi saya cuma dengar aja gak kasih saran atau bertanya. Saya ikut aja kalau saya senang dan ada waktu ya ikut untuk hiburan lah...Saya kan dah tua apalagi yang saya pikirkan” (Sb).*

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan perempuan kepala keluarga yang sudah berusia lanjut (Ibu Sb, 62 tahun) hanya pada tingkat kesejahteraan bathin, akses terhadap kelas KF, pelayanan kesehatan gratis dan raskin, sedangkan tingkat partisipasi cenderung rendah, serta kesadaran kritis dan kontrol dalam lingkup keluarga maupun lingkungan belum tercapai. Hal ini disebabkan karena usianya yang sudah lanjut dan tinggal bersama anaknya.

Sedangkan bagi perempuan kepala keluarga lain yaitu Ibu Hmm, Ibu Rh, Ibu NC dan Ibu BR, pelaksanaan program pemberdayaan ini memberi dampak positif terutama dalam peningkatan usaha mereka. Mereka mengaku dengan adanya program simpan pinjam kelompok dan dana pinjaman modal usaha dapat meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan diri serta keluarganya.

Sebelum mengikuti program ini, perempuan kepala keluarga ini dapat dikatakan memiliki pendapatan yang rendah dibandingkan dengan rumahtangga yang kepala keluarga laki-laki. Kehidupan PEKKA ini hanya memiliki usaha kecil-kecilan seperti jualan kue ke warung, jualan kue tradisional, tukang nyuci panggilan dan menjadi buruhtani pada musim ke sawah. Penghasilan yang mereka terima tidak menentu. Rata-rata mereka hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,00 sampai Rp. 20.000,00 perhari dari pekerjaannya

tersebut. Tetapi setelah mengikuti program pemberdayaan ini dan memiliki usaha masing-masing, kehidupan anggota jauh lebih sejahtera dan bahkan ada yang memiliki pendapatan melebihi rumahtangga yang kepala keluarga laki-laki.

Peningkatan pendapatan dapat dilihat dari adanya penerimaan penghasilan dari usaha yang telah dijalankan dengan modal pinjaman tersebut, seperti yang dialami oleh Ibu NC dan BR yang memiliki usaha jualan kue tradisional dengan pendapatan rata-rata sebesar satu juta lima ratus rupiah setiap bulan. Hal tersebut dipertegas oleh Ibu NC berikut ini:

*“Dari hasil jualan kue ini saya dapat lima puluh ribu lah satu hari, rata-ratanya ya, kadang-kadang juga tiga puluh, empat puluh gak tentu lah. Daripada dulu cuma dua puluh ribu sehari itupun kalau ada,....” (NC).*

Hal yang sama juga dialami oleh Ibu BR, berikut kutipan wawancara dengan Ibu BR:

*“Iya ada peningkatan ya, dulu saya jualan kue hanya dapat untung paling lima belas sehari tapi sekarang dengan ada modal dari PEKKA, saya bisa buat kue lebih banyak sehingga pendapatan bertambah, biasanya saya dapat untung empat puluh, lima puluh satu hari gak tentu lah.....” (BR).*

Peningkatan pendapatan juga dialami Ibu Rh yang memiliki usaha di bidang pertanian. Sebelum mengikuti program ini, hanya menjadi buruhtani pada musim ke sawah, pendapatan mereka rata-rata per hari sebesar Rp. 20.000,00. Namun, setelah mendapat bantuan modal usaha sudah berani menggarap sawah orang lain dengan

sistem bagi hasil. Dari usahanya tersebut mereka mendapat keuntungan rata-rata lima juta sampai enam juta per sekali panen (empat bulan sekali) jika hasil panennya tidak gagal. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rh:

*“Iya ada peningkatan pendapatan buat saya, sekarang saya garap sawah Nyak Aj dengan bagi hasil. Dapat lah untung kalau padinya bagus sekitar empat setengah juta sekali panen. Daripada dulu saya cuma jadi buruhtani paling dapat dua puluh ribu sehari, itu kalau saya rajin ke sawah” (Rh).*

Tingkat kesejahteraan juga dapat dilihat dari tingkat simpanan di kelompok. Jumlah simpanan perempuan kepala keluarga ini adalah Rp. 200.000,00 (Ibu BR), Rp. 210.000,00 dan (Ibu Rh), Rp. 76.000,00 (Ibu NC). Jumlah simpanan Ibu-Ibu ini relatif besar, hanya Ibu NC saja yang memiliki jumlah simpanan paling sedikit. Menurut Ibu NC hal tersebut terjadi karena dia lebih memilih mengembalikan pinjaman modal usaha terlebih dahulu dibandingkan menyimpan di kas kelompok. Karena pengembalian modal usaha adalah suatu kewajiban, sedangkan simpanan bisa dilakukan kapan saja dalam jumlah yang tidak ditentukan.

Peningkatan kesejahteraan anggota kelompok juga dapat dilihat dari kepemilikan aset. Kepemilikan aset setiap perempuan kepala keluarga ini berbeda-beda tergantung kepada jumlah pendapatan yang diperoleh dari usaha mereka masing-masing. Misalnya Ibu BR telah dapat membeli televisi, Ibu Hmm telah dapat membeli sepeda untuk anaknya bersekolah, Ibu Rh sudah merenovasi rumahnya, sedangkan Ibu NC sudah dapat

menambah peralatan membuat kue seperti *mixer*, penggorengan dan lain-lain. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rh:

*“Dari hasil usaha saya itu saya udah bisa renovasi rumah sedikit ya, jadi ada keliatan lah hasilnya, pelan-pelan. Kan untung dari kita bersawah kan gak terlalu banyak, ya kalau ada lebih ya kita buat lah biar bagus dikit rumahnya biar gak bocor lagi...” (Rh).*

Akses lain yang dimiliki oleh perempuan kepala keluarga ini adalah layanan untuk mendapatkan pengobatan gratis di puskesmas atau rumah sakit. Mereka mengaku hanya membawa KTP saja jika berobat dan tidak dikenakan biaya apapun, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rh berikut ini:

*“Kalau berobat kita gratis, hanya bawa KTP aja ke puskesmas. Kita gak bayar apa-apa” (Rh).*

Perempuan kepala keluarga yang buta huruf mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti kelas KF (Keaksaraan Fungsional) yang difasilitasi oleh PL. Mereka diajarkan baca tulis hingga mendapatkan sertifikat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hmm salah satu anggota yang buta huruf berikut ini:

*“Saya ikut kelas buta huruf karena saya gak pernah sekolah jadi gak bisa baca tulis. Ada beberapa orang anggota, kami diajarkan baca tulis, sekarang saya sudah mulai bisa dan baca tapi belum lancar...” (Hmm).*

Manfaat dari pelaksanaan program pemberdayaan ini bukan hanya dirasakan oleh Ibu-Ibu ini tapi juga dirasakan oleh anak-anaknya terutama yang masih duduk di bangku sekolah. Anak-anak yang masih berusia sekolah mereka mendapatkan bea siswa

berupa perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, buku serta seragam. Sedangkan yang masih usia dini bisa mendapatkan pendidikan anak usia dini (PAUD) secara gratis yang dikelola oleh PEKKA. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Hmm yang salah satu anaknya mendapatkan beasiswa:

*“Iya selain dapat manfaat ke saya, anak saya juga dapat manfaat dari program ini. Anak saya yang SMP dapat beasiswa berupa baju sekolah, tas, buku-buku, sepatu ya. Kan itu sangat membantu saya dan keluarga” (Hmm).*

Manfaat lain yang dirasakan adalah dapat menambah keberanian dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan desa, seperti yang dialami oleh Ibu Rh yang menjabat menjadi sekretaris PKK. Ibu ini mengaku sering hadir dalam rapat desa baik rapat khusus perempuan maupun rapat yang melibatkan laki-laki dan sering memberikan saran, pendapat atau pertanyaan dalam rapat tersebut, di mana menurutnya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan semua diberikan hak dan akses yang sama, seperti yang disampaikannya berikut ini:

*“Saya sekarang diangkat jadi sekretaris PKK. Dulu sebelum ikut program saya gak mau karena gak berani tapi sekarang saya sudah berani kok kan udah banyak pengetahuan dan udah sering ngomong depan orang banyak, saya juga sering hadir kalau ada rapat di desa. Saya juga sering bertanya atau kasih pendapat dalam rapat walaupun rapat itu dihadiri oleh laki-laki, semua boleh bicara” (Rh).*

Program pemberdayaan ini juga telah membuka akses perempuan untuk berdiskusi dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Mereka mampu mengusulkan dan mengawasi pembuatan kebijakan lokal yang berhubungan dengan persoalan ketidakadilan yang mereka hadapi, misalnya mereka sudah pernah melakukan dialog dengan aparat pemerintahan tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten bersama dengan anggota dari desa lain, yaitu berdialog dengan anggota DPRD Tingkat I, BPM Propinsi, Bappeda dan PPK dengan topik dialog adalah “Buka Mata Buka Hati” yang diadakan di Center PEKKA di Kecamatan Mutiara Timur. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Am:

*“Kalau masalah itu, dulu kita semua anggota ikut berdialog sama-sama dengan anggota dari desa lain di Center PEKKA, kita dialog dengan anggota DPRD, BPM, Bappeda dan PPK masalah yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga. Kita semua diberi kesempatan untuk menceritakan keluh kesah kita dan apa yang belum terpenuhi serta kendala-kendala yang dihadapi. Bagus lah jadi kita bisa mengerti dan merekapun menanggapi keluh kesah kita” (Am).*

### **Manfaat PEKKA Berdasarkan Pandangan Masyarakat bukan Anggota**

Manfaat penyelenggaraan program PEKKA bagi anggotanya juga dinilai berdasarkan dari sudut pandang masyarakat bukan penerima manfaat. Salah satu tokoh masyarakat yang dimintai pendapatnya adalah Bapak MYH yang menjabat sebagai Kepala Desa (*geuchik*) Dayah Tanoh. Bapak MYH menilai bahwa program PEKKA ini telah memberikan manfaat



bagi anggotanya karena menurutnya kondisi perempuan kepala keluarga menjadi lebih baik dengan adanya program PEKKA. Kesejahteraan perempuan kepala keluarga menjadi lebih baik, pengetahuan dan keterampilannya juga meningkat. Bapak MYH pun berpendapat bahwa program ini berkontribusi dalam menyetarakan kesejahteraan perempuan kepala keluarga dengan warga lainnya, jika tidak ada program PEKKA ini, mungkin kondisi ibu-ibu yang berstatus sebagai kepala keluarga akan jauh lebih buruk atau tidak seperti saat ini. Meski demikian, Bapak MYH menilai bahwa keberadaan PEKKA belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi perempuan kepala keluarga yang sudah berusia lanjut. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Bapak MYH selaku Kepala Desa Dayah Tanoh:

*“...iya PEKKA itu programnya banyak kasih manfaat ya buat janda-janda yang ikut, selama ikut program itu mereka kelihatannya jadi lebih baik lebih sejahtera, lebih pintar dan berani. Mereka sekarang mampu hidup ssejajar dengan warga lain, daripada sebelum ada program, mereka hidupnya bisa dibilang serba kekurangan lah. Tapi janda yang udah usia lanjut tidak ada perubahan apa-apa ya karena mereka tidak lagi sanggup menjalankan usaha dan kebanyakan dari mereka tinggal dengan anaknya” (MYH).*

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Um yang merupakan seorang tokoh agama menilai bahwa keberadaan PEKKA di desanya cukup memberikan dampak yang positif bagi para perempuan kepala keluarga

karena mampu meringankan beban mereka terutama bidang ekonomi seperti adanya bea siswa bagi anak-anak mereka, pinjaman modal usaha dan kegiatan simpan pinjam kelompok. Namun demikian, beliau pesimis keberadaan program PEKKA ini dapat meningkatkan status perempuan kepala keluarga menjadi setara dengan kepala keluarga laki-laki karena bagaimanapun juga kodrat laki-laki dan perempuan berbeda. Berikut penjelasan dari Ibu Um:

*“PEKKA itu bagus ya terutama bagi anggota yang ikut. Karena sekarang sangat terbantu mereka dalam masalah ekonomi ya, dengan ikut PEKKA mereka bisa dapat pinjaman modal usaha, dapat bea siswa anak sekolah dan ada simpan pinjam jadi bisa terbantu lah untuk kebutuhan mereka. PEKKA memang sudah banyak merubah kehidupan dan perilaku janda-janda di sini ke arah yang lebih baik tapi saya belum yakin kalau perempuan itu bisa sama dengan laki-laki karena kan kodratnya emang beda” (Um).*

Berbeda dengan tokoh masyarakat lainnya, Ibu Rm yang merupakan istri dari Kepala Desa Dayah Tanoh lebih menyeroti aspek sosial sebagai manfaat dari keberadaan program PEKKA ini. Menurut Ibu Rm keberadaan program PEKKA di desanya telah memberikan manfaat kepada para perempuan kepala keluarga, khususnya dari aspek sosial karena sebelum adanya program ini banyak perempuan kepala keluarga yang tidak pernah mengikuti kegiatan di desa, tidak tau program, umumnya merasa malu, minder dan tidak tahu apa-apa. Setelah adanya program PEKKA ini, mereka menjadi mempunyai kegiatan sosial yang lebih

bersifat organisasi. Mereka juga sekarang menjadi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa, jika ada rapat desa mereka sudah berani datang. Keberadaan program ini juga telah mampu menggali dan mengembangkan potensi anggotanya serta bisa tampil lebih percaya diri atau berani mengungkapkan pendapat di muka umum. Dari segi ekonomi, keberadaan program PEKKA ini sudah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka melalui kegiatan pemberian pinjaman modal usaha dan kegiatan simpan pinjam kelompok. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Ibu Rm:

*“Iya PEKKA memang telah beri banyak manfaat buat anggotanya. Misalnya dulu sebelum ada program ini mereka kan sangat jarang ikut dalam kegiatan desa, katanya gak berani, malu, minder kalau hadir di muka umum. Tapi sekarang mereka jadi lebih aktif dalam kegiatan desa, bahkan sudah lebih berani dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang bukan anggota. kalau dari segi ekonomi, mereka sudah sudah lebih sejahtera lah buk...” (Rm).*

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) belum sepenuhnya bisa menciptakan keberdayaan bagi perempuan kepala keluarga yang berusia lanjut karena mereka mengikuti program hanya untuk mengisi waktu luang, berkumpul bersama, dan memperoleh informasi. Namun pelaksanaan program PEKKA ini secara umum telah memberikan dampak positif bagi semua anggotanya. Hal itu tercermin dari

peningkatan kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol perempuan kepala keluarga terhadap sumberdaya sesuai dengan tujuan dari program pemberdayaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- (BPS) Badan Pusat Statistik. 2010. Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbeda Hukum Indonesia. Jakarta.
- Habermas, J. 1990. *Discourse Ethics: Notes on A Program of Philosophical Justification. The Communicative Ethics Controversy*. Cambridge: The MIT Press.
- Miles M.B. Huberman A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Rahim, SA. 2004. *Participatory Development Communication as a Dialogical Process dalam White, SA. 2004. Participatory Communication Working for Change and Development*. New Delhi: Sage Publication India Pvt Ltd.
- Salim, A. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Saptandari, P. 1999. Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Th XII, No.2.
- Suharto, E. 2003. Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial. Mizan. Jakarta.
- White, RA.2004. *Is “Empowerment” the Answer?: current theory and research on development communication*. International Communication Gazette 2004;66; 7.
- www.pekka.or.id/ [Tanggal 20 September 2011].